

# **Leaderless Group Discussion**

**UNTUK SKEMA ASESMEN  
ADMINISTRATOR**

## Angka Bicara, Rakyat Merana: Dilema Akurasi Data Inflasi Instansi Data di Tengah Krisis Ekonomi

Dalam simulasi ini, Anda akan berperan sebagai **Manajer Koordinasi Data Inflasi** di instansi data nasional. Sebagai individu yang memegang tanggung jawab koordinasi, tugas utama Anda adalah memastikan bahwa metode pengumpulan data inflasi yang digunakan dapat diintegrasikan secara seragam di seluruh instansi terkait.

Angka inflasi nasional yang dirilis instansi data menunjukkan penurunan sebesar 5% dalam beberapa bulan terakhir. Namun, di sisi lain, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur terus melonjak di pasar. Harga beras naik hingga 20%, minyak goreng mencapai Rp20.000 per liter, dan telur ayam mengalami kenaikan hingga 25%. Di tengah situasi ini, survei independen mengungkapkan bahwa 70% masyarakat merasa kondisi ekonomi mereka semakin memburuk. Ketidaksesuaian antara data resmi dengan kenyataan di lapangan memicu krisis kepercayaan terhadap instansi data.

Masalah utama yang dihadapi adalah metode penghitungan inflasi yang masih mengandalkan Indeks Harga Konsumen (IHK) berbasis keranjang barang tertentu. Keranjang barang ini tidak lagi relevan dengan pola konsumsi masyarakat saat ini. Barang elektronik seperti televisi tetap masuk dalam perhitungan, sementara kebutuhan digital seperti pulsa dan kuota internet tidak terwakili secara memadai. Akibatnya, angka inflasi yang dihasilkan tidak mencerminkan kenyataan, sehingga menimbulkan bias dalam data.

Wilayah terpencil juga menjadi tantangan besar. Sebanyak 40% kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak terakomodasi karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Enumerasi sering kali terhambat oleh kendala geografis dan minimnya akses transportasi. Hal ini menyebabkan data yang dikumpulkan lebih banyak merepresentasikan kawasan perkotaan daripada pedesaan, menciptakan ketidakseimbangan dalam data inflasi nasional.

Ketidakakuratan data ini berdampak serius pada kebijakan publik. Pemerintah, yang mengalokasikan Rp30 triliun untuk subsidi pangan berdasarkan angka inflasi, menghadapi tantangan dalam distribusi yang tidak tepat sasaran. Wilayah yang seharusnya menerima subsidi lebih besar justru mendapatkan lebih sedikit, memicu ketidakpuasan masyarakat. Bank sentral juga mengalami kesulitan dalam menetapkan kebijakan moneter. Keputusan untuk menahan suku bunga acuan berdasarkan data inflasi yang tidak akurat telah memicu ketidakstabilan di sektor keuangan.

Perbedaan pendekatan antar-instansi terkait juga menjadi hambatan. Instansi data menggunakan metode survei, sementara kementerian perdagangan lebih mengandalkan data pasar tradisional. Ketiadaan standar pengumpulan data yang seragam memperparah situasi. Dalam rapat koordinasi terakhir, perbedaan ini memicu ketegangan antar instansi. Ketidakselarasan ini membuat integrasi data menjadi sulit, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil tidak efektif.

Survei internal menunjukkan bahwa 60% masyarakat merasa data inflasi tidak mencerminkan realitas, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan. Krisis ini semakin diperburuk dengan kurangnya komunikasi yang efektif dari instansi data. Data yang dirilis sering kali disampaikan dalam format teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat tidak hanya meragukan angka yang dirilis, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang bertugas mengelolanya.

Selain itu, kurangnya sinergi antar instansi memperburuk situasi. Sebanyak 55% lembaga pemerintah mengakui bahwa mereka belum memiliki standar pengumpulan data yang seragam, sehingga menyulitkan integrasi. Data pasar tradisional sering kali bertentangan dengan data survei yang dilakukan oleh instansi pusat. Akibatnya, pengambilan kebijakan yang berbasis data menjadi tidak optimal, bahkan terkadang kontraproduktif.

Tim administrator di instansi data nasional dihadapkan pada tugas besar untuk mengatasi tantangan ini. Mereka harus meningkatkan sinergi antar instansi, membangun standar pengumpulan data yang seragam, dan merancang metode pengumpulan data yang dapat menjangkau wilayah terpencil secara akurat. Selain itu, strategi komunikasi yang transparan harus dirancang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap data resmi. Dengan data yang lebih valid dan kredibel, pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih relevan dan tepat sasaran.

- **Bacalah tulisan diatas dengan seksama untuk menjawab pertanyaan dibawah ini !**
  1. Buatlah rekomendasi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada !
- **Rekomendasi ini akan didiskusikan untuk mendapatkan keputusan bersama.**
- **Rekomendasi yang terpilih sebagai keputusan bersama akan mendapatkan kesempatan menjadi kandidat untuk diberikan kesempatan untuk pengembangan diri dan promosi.**

Catatan : Semua anggota memiliki posisi yang sama dalam menyampaikan pandangan, dan tidak diperbolehkan adanya voting.